

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2026 DAN NOMOR 100.2.1.4/22 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

Nota Kesepakatan ini disusun dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 yang memerlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Kebumen serta menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. KUA Tahun Anggaran 2027 memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran serta konsistensinya dengan RKPD Tahun 2027 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Materi pokok Nota Kesepakatan meliputi asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, kerangka ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan pembangunan diarahkan pada tema “Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, dengan perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur, pembangunan berwawasan lingkungan, tata kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemajuan kebudayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi PAD, transfer ke daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan kebijakan belanja dilakukan secara selektif, akuntabel, berkeadilan, berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan serta pemenuhan mandatory spending. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit melalui sumber penerimaan pembiayaan, termasuk SiLPA, serta mengatur pengeluaran pembiayaan sesuai kemampuan fiskal daerah. Strategi pencapaian antara lain dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berbasis teknologi, optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan kualitas perencanaan, efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif dan belanja modal, serta peningkatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal.

Catatan: Nota Kesepakatan ditandatangani di Kebumen pada tanggal 6 Agustus 2026 oleh Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani selaku Pihak Pertama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen selaku Pihak Kedua, yaitu Ketua H. Saman serta Wakil Ketua Fitria Handini, S.H., Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc., dan Solatun, A.Md. KUA Tahun Anggaran 2027 yang terdiri atas BAB I sampai dengan BAB VIII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan dan menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2027. KUA yang telah dibahas dan disepakati selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan acuan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2027.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE REGIONAL GOVERNMENT OF KEBUMEN REGENCY AND THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 12 OF 2026 AND NUMBER 100.2.1.4/22 OF 2026 CONCERNING THE GENERAL POLICY OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2027.

This Memorandum of Agreement was prepared as part of the formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2027, which requires a General Budget Policy (KUA) jointly agreed upon by the Regional Government of Kebumen Regency and the Regional House of Representatives of Kebumen Regency as the basis for preparing the 2027 Provisional Budget Priorities and Ceilings (PPAS). The 2027 General Budget Policy sets out the direction of regional fiscal policy and development priorities to ensure integration between development planning and budgeting and consistency with the 2027 Regional Government Work Plan (RKPD) and the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD).

The main substance of this Memorandum of Agreement covers the basic assumptions for preparing the 2027 Regional Revenue and Expenditure Budget, the regional macroeconomic framework, regional revenue policy, regional expenditure policy, regional financing policy, and strategies for their achievement. The development policy is directed toward the theme “Fulfillment of Infrastructure to Strengthen Accessibility to Basic Services and Tourism Development to Accelerate Poverty Reduction.” Development priorities address poverty reduction, improvement of human resource quality, regional economic productivity and competitiveness, equitable infrastructure development, environmentally sustainable development, good governance, public security and order, and cultural advancement. Revenue policy is directed toward optimizing Regional Own-Source Revenue, intergovernmental transfers, and other legitimate regional revenues. Expenditure policy is implemented selectively, accountably, equitably, and based on performance while taking into account development priorities and mandatory spending requirements. Financing policy is directed toward addressing budget deficits through financing receipts, including the use of the previous year's Budget Surplus (SiLPA), and regulating financing expenditures according to the region's fiscal capacity. Strategies include intensification and extensification of technology-based regional taxation, optimization of motor vehicle tax revenues, electronic regional government transactions, improvement of planning quality, efficiency of non-priority expenditures, strengthening productive and capital expenditures, and improvement of monitoring, evaluation, and internal control.

Note: *This Memorandum of Agreement was signed in Kebumen on 6 August 2026 by the Regent of Kebumen, Hj. Lilis Nuryani, as the First Party and the Leadership of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency as the Second Party, consisting of Chair H. Saman and Vice Chairs Fitria Handini, S.H., Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc., and Solatun, A.Md. The 2027 General Budget Policy, comprising Chapters I through VIII, constitutes an integral part of the Memorandum of Agreement and serves as the basis for preparing the 2027 Provisional Budget Priorities and Ceilings (PPAS). The agreed General Budget Policy also serves as a guideline for preparing Regional Apparatus Work and Budget Plans (RKA-PD).*